



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 26 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 7 ayat (9) dan Ketentuan pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
3. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya;
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen;
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor;
8. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat;

9. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang;

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan adalah jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak dan 4 tak, dan isi silinder.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan bermotor angkutan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) khusus Penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

**Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk****Pasal 7**

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur sebagai tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Alat-Alat Berat dan Alat Alat Besar

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.

Pasal 9

- (1) Nilai jual alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Buku Empat Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Tambahan Lampiran

Pasal 10

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur sebagai tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 - 1) untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (off the road) atau 21,5 % (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road);

- 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
 - 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing-masing.
- (2) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor atas Kereta Gandeng atau Tempel :
- a. Nilai jual kendaraan bermotor atas Kereta Gandeng atau tempel sebagai dasar penghitungan PKB, berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai Kereta Gandeng atau Tempel.
 - b. Penghitungan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor atas Kereta Gandeng atau Tempel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
 - c. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan angkutan umum orang atas Kereta Gandeng atau Tempel ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - d. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan angkutan umum barang atas Kereta Gandeng atau Tempel ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- e. Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor atas Kereta Gandeng atau Tempel adalah sebagai perkalian dari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Kereta Gandeng atau Tempel, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, (2) huruf b, (2) huruf c dan tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin :
- a. Nilai jual kendaraan bermotor Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin sebagai dasar penghitungan PKB, berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin.
 - b. Penghitungan dasar pengenaan PKB Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
 - c. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan angkutan umum orang Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
 - d. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan angkutan umum barang Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
 - e. Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin adalah sebagai perkalian dari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, (3) huruf b, (3) huruf c dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III
TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang
Dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 12

- (1) Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai perkalian dari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Tarif pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor bukan umum/pribadi ditetapkan :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
 - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);
 - d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5 % (empat koma lima persen);
 - e. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 5,5 % (lima koma lima persen);
- (3) Tarif Pajak Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan bagi kendaraan pribadi milik badan kecuali kendaraan bermotor atas nama pribadi.
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (5) Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Umum ditetapkan sebesar 1 % (satu persen);
- (6) Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan bermotor milik Lembaga Sosial Keagamaan, Pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/POLRI, Pemerintah Daerah, Ambulance, Pemadam Kebakaran masing-masing sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
- (7) Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 13

- (1) BBN-KB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur yaitu Dasar Pengenaan BBN-KB dan Tarif BBN-KB;
- (2) Tarif pengenaan BBN-KB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk penyerahan pertama, sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen);
 - b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen);
- (3) Tarif pengenaan BBN-KB khusus Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk penyerahan pertama, sebesar 0,75 % (nol koma tujuh lima persen);
 - b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh lima persen);

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kendaraan Bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

Pasal 15

- (1) Lampiran Peraturan Gubernur ini, terdiri dari 5 (lima) buku yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Buku Satu memuat : Sedan dan sejenisnya;
 - b. Buku Dua memuat : Jeep, Mini Bus, Micro Bus (station wagon) dan Bus;
 - c. Buku Tiga memuat : Mobil Barang Pick Up, Light Truck, Truck dan Rubah Bentuk;
 - d. Buku Empat memuat : Kendaraan Bermotor Alat -Alat Berat / Besar.
 - e. Buku Lima memuat : Sepeda Motor roda 2 dan Roda 3;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

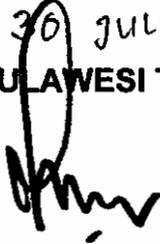
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 30 Juli 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

| DINAS | | PERAT |
|------------|---|-------|
| ASS III | 1 | |
| Kabispenda | 2 | |
| KARO HUKUM | 3 | |
| | 4 | |
| | 5 | |

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 30 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,



ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013

NOMOR :

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

TAHUN 2013

JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM / PRIBADI (PERORANGAN) DIKENAKAN TARIF PROGRESIF

| NO | KODING | MEREK | TYPE | TH BUAT | NKB - DPBBN-KB | BOBOT | DP PKB | BESARAN BBNKB PENYERAHAN PERTAMA | | BESARAN PKB KEPENJILAN PERTAMA | | |
|----|--------------|-----------|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| | | | | | | | | PRIBADI, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Ambulance, DAMKAR | ISK, Angkutan ORANG UMUM | PRIBADI | ISK, TNI/POLRI Pemerintah Daerah, Ambulance, DAMKAR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 101079 15712 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.4 LT A/T | 2013 | 175.000.000 | 1.0 | 175.000.000 | 21.875.000 | 13.125.000 | 2.825.000 | 1.050.000 | 875.000 |
| 2 | 101079 15812 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.4 LT M/T | 2013 | 166.000.000 | 1.0 | 166.000.000 | 20.750.000 | 12.450.000 | 2.490.000 | 996.000 | 830.000 |
| 3 | 101079 15912 | CHEVROLET | AVEO SEDAN 1.4 LS M/T | 2013 | 160.000.000 | 1.0 | 160.000.000 | 20.000.000 | 12.000.000 | 2.400.000 | 960.000 | 800.000 |
| 4 | 101079 04812 | CHEVROLET | KALOS 1.4L LS MT | 2013 | 127.000.000 | 1.0 | 127.000.000 | 15.875.000 | 9.525.000 | 1.905.000 | 762.000 | 635.000 |
| 5 | 101079 12512 | CHEVROLET | LOVA 1.4L M/T | 2013 | 131.000.000 | 1.0 | 131.000.000 | 16.375.000 | 9.825.000 | 1.965.000 | 786.000 | 655.000 |
| 6 | 101118 13012 | FORD | Fiesta SEDAN 1.4L M/T | 2013 | 169.000.000 | 1.0 | 169.000.000 | 21.125.000 | 12.675.000 | 2.535.000 | 1.014.000 | 845.000 |
| 7 | 101118 13112 | FORD | Fiesta SEDAN 1.6L A/T | 2013 | 192.000.000 | 1.0 | 192.000.000 | 24.000.000 | 14.400.000 | 2.880.000 | 1.152.000 | 960.000 |
| 8 | 101118 14312 | FORD | FOCUS SEDAN TITANIUM 2.0L AT | 2013 | 290.000.000 | 1.0 | 290.000.000 | 36.250.000 | 21.750.000 | 4.350.000 | 1.740.000 | 1.450.000 |
| 9 | 101118 14412 | FORD | FOCUS SEDAN TREND 1.6L AT | 2013 | 266.000.000 | 1.0 | 266.000.000 | 33.250.000 | 19.950.000 | 3.990.000 | 1.596.000 | 1.330.000 |
| 10 | 101167 30549 | HONDA | ACCORD CP2 2.4 VTI AT | 2013 | 350.000.000 | 1.0 | 350.000.000 | 43.750.000 | 26.250.000 | 5.250.000 | 2.100.000 | 1.750.000 |
| 11 | 101167 30749 | HONDA | ACCORD CP2 2.4 VTI L AT | 2013 | 360.000.000 | 1.0 | 360.000.000 | 47.500.000 | 28.500.000 | 5.700.000 | 2.280.000 | 1.900.000 |
| 12 | 101167 30949 | HONDA | ACCORD CP2 3.5 V6 AT | 2013 | 557.000.000 | 1.0 | 557.000.000 | 69.625.000 | 41.775.000 | 8.355.000 | 3.342.000 | 2.785.000 |
| 13 | 101167 38249 | HONDA | ACCORD CR2 VTI AT | 2013 | 354.000.000 | 1.0 | 354.000.000 | 44.250.000 | 26.550.000 | 5.310.000 | 2.124.000 | 1.770.000 |
| 14 | 101167 38349 | HONDA | ACCORD CR2 VTI L AT | 2013 | 366.000.000 | 1.0 | 366.000.000 | 48.250.000 | 28.950.000 | 5.790.000 | 2.316.000 | 1.930.000 |
| 15 | 101167 33149 | HONDA | CITY GM2 1.5 E A/T | 2013 | 225.000.000 | 1.0 | 225.000.000 | 28.125.000 | 16.875.000 | 3.375.000 | 1.350.000 | 1.125.000 |
| 16 | 101167 33249 | HONDA | CITY GM2 1.5 E M/T | 2013 | 213.000.000 | 1.0 | 213.000.000 | 26.625.000 | 15.975.000 | 3.195.000 | 1.278.000 | 1.065.000 |
| 17 | 101167 32949 | HONDA | CITY GM2 1.5 S A/T | 2013 | 218.000.000 | 1.0 | 218.000.000 | 27.250.000 | 16.350.000 | 3.270.000 | 1.308.000 | 1.090.000 |
| 18 | 101167 33049 | HONDA | CITY GM2 1.5 S M/T | 2013 | 206.000.000 | 1.0 | 206.000.000 | 25.750.000 | 15.450.000 | 3.090.000 | 1.238.000 | 1.030.000 |
| 19 | 101167 36849 | HONDA | CIVIC FB2 1.8 A/T | 2013 | 281.000.000 | 1.0 | 281.000.000 | 35.125.000 | 21.075.000 | 4.215.000 | 1.686.000 | 1.405.000 |
| 20 | 101167 36949 | HONDA | CIVIC FB2 1.8 M/T | 2013 | 271.000.000 | 1.0 | 271.000.000 | 33.875.000 | 20.325.000 | 4.065.000 | 1.626.000 | 1.355.000 |
| 21 | 101167 37049 | HONDA | CIVIC FB3 2.0 A/T | 2013 | 319.000.000 | 1.0 | 319.000.000 | 39.875.000 | 23.925.000 | 4.785.000 | 1.914.000 | 1.595.000 |
| 22 | 101177 14075 | HYUNDAI | ELANTRA 1.6 M/T | 2013 | 226.000.000 | 1.0 | 226.000.000 | 28.250.000 | 16.950.000 | 3.390.000 | 1.356.000 | 1.130.000 |
| 23 | 101177 14175 | HYUNDAI | EXCEL III 1.4 M/T | 2013 | 137.000.000 | 1.0 | 137.000.000 | 17.125.000 | 10.275.000 | 2.055.000 | 822.000 | 685.000 |

UJUTUK KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM / PRIBADI (PERORANGAN) DIKENYAKAN TARIF PROGRESIF

| NO | KODING | MEREK | TYPE | TH BUAT | NKB - DPBBN-KB | BOBOT | DP PKB | BESARAN BBNKB PENTERAHAN PERTAMA | | | BESARAN PKB KEPENILIKAN PERTAMA | | |
|----|--------------|---------------|--------------------------------|---------|----------------|-------|---------------|--|----------------|------------|---------------------------------|----------------|------|
| | | | | | | | | LSK, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Ambulance, DAMKAR | Angkutan ORANG | UMUM | PRIBADI | Angkutan ORANG | UMUM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 24 | 101177 12375 | HYUNDAI | SONATA 2.0 A/T | 2013 | 315.000.000 | 1.0 | 315.000.000 | 39.375.000 | 23.625.000 | 4.725.000 | 1.890.000 | 1.575.000 | |
| 25 | 101177 12475 | HYUNDAI | SONATA 2.4 A/T | 2013 | 354.000.000 | 1.0 | 354.000.000 | 44.250.000 | 26.550.000 | 5.310.000 | 2.124.000 | 1.770.000 | |
| 26 | 101177 14475 | HYUNDAI | SONATA 2.4 MT (TAXI) | 2013 | 150.000.000 | 1.0 | 150.000.000 | 18.750.000 | 11.250.000 | 2.250.000 | 900.000 | 750.000 | |
| 27 | 101643 00149 | INFINITI | G37 COUPE (4X2) A/T | 2013 | 879.000.000 | 1.0 | 879.000.000 | 109.875.000 | 65.925.000 | 13.185.000 | 5.274.000 | 4.395.000 | |
| 28 | 101643 00349 | INFINITI | M37 (4X2) A/T | 2013 | 879.000.000 | 1.0 | 879.000.000 | 109.875.000 | 65.925.000 | 13.185.000 | 5.274.000 | 4.395.000 | |
| 29 | 101215 06875 | KIA | CERATO SE 1.6 MT | 2013 | 109.000.000 | 1.0 | 109.000.000 | 13.625.000 | 8.175.000 | 1.635.000 | 654.000 | 545.000 | |
| 30 | 101489 02249 | LEXUS | GS250 A/T | 2013 | 746.000.000 | 1.0 | 746.000.000 | 93.250.000 | 55.950.000 | 11.190.000 | 4.476.000 | 3.730.000 | |
| 31 | 101489 02349 | LEXUS | GS350 A/T | 2013 | 852.000.000 | 1.0 | 852.000.000 | 106.500.000 | 63.960.000 | 12.780.000 | 5.112.000 | 4.260.000 | |
| 32 | 101489 02449 | LEXUS | GS450h Hybrid A/T | 2013 | 1.068.000.000 | 1.0 | 1.068.000.000 | 133.500.000 | 80.100.000 | 16.020.000 | 6.408.000 | 5.340.000 | |
| 33 | 101489 00449 | LEXUS | IS300 AT (GS22R-AETLK) | 2013 | 879.000.000 | 1.0 | 879.000.000 | 109.875.000 | 65.925.000 | 13.185.000 | 5.274.000 | 4.395.000 | |
| 34 | 101489 02649 | LEXUS | IS300C A/T | 2013 | 879.000.000 | 1.0 | 879.000.000 | 109.875.000 | 65.925.000 | 13.185.000 | 5.274.000 | 4.395.000 | |
| 35 | 101489 02149 | LEXUS | IS-F A/T | 2013 | 1.213.000.000 | 1.0 | 1.213.000.000 | 151.625.000 | 90.975.000 | 18.195.000 | 7.278.000 | 6.065.000 | |
| 36 | 101489 00749 | LEXUS | LS460L AT (USF41R-AEZGHW) | 2013 | 1.703.000.000 | 1.0 | 1.703.000.000 | 212.875.000 | 127.725.000 | 25.545.000 | 10.218.000 | 8.515.000 | |
| 37 | 101489 01749 | LEXUS | LS600hL A/T Hybrid | 2013 | 2.167.000.000 | 1.0 | 2.167.000.000 | 270.875.000 | 162.525.000 | 32.505.000 | 13.002.000 | 10.835.000 | |
| 38 | 101253 12849 | MAZDA | 2 SDN 1.5L R A/T | 2013 | 199.000.000 | 1.0 | 199.000.000 | 24.875.000 | 14.925.000 | 2.985.000 | 1.194.000 | 995.000 | |
| 39 | 101253 12949 | MAZDA | 2 SDN 1.5L R1M/T | 2013 | 191.000.000 | 1.0 | 191.000.000 | 23.875.000 | 14.325.000 | 2.865.000 | 1.146.000 | 955.000 | |
| 40 | 101253 13049 | MAZDA | 2 SDN 1.5L S A/T | 2013 | 183.000.000 | 1.0 | 183.000.000 | 22.875.000 | 13.725.000 | 2.745.000 | 1.098.000 | 915.000 | |
| 41 | 101253 13149 | MAZDA | 2 SDN 1.5L S M/T | 2013 | 175.000.000 | 1.0 | 175.000.000 | 21.875.000 | 13.125.000 | 2.625.000 | 1.050.000 | 875.000 | |
| 42 | 101253 14549 | MAZDA | 2 SDN 1.5L V A/T | 2013 | 187.000.000 | 1.0 | 187.000.000 | 23.375.000 | 14.025.000 | 2.805.000 | 1.122.000 | 935.000 | |
| 43 | 101253 14649 | MAZDA | 2 SDN 1.5L V M/T | 2013 | 179.000.000 | 1.0 | 179.000.000 | 22.375.000 | 13.425.000 | 2.685.000 | 1.074.000 | 895.000 | |
| 44 | 101253 10749 | MAZDA | 6 - 2.5L AT | 2013 | 383.000.000 | 1.0 | 383.000.000 | 47.875.000 | 28.725.000 | 5.745.000 | 2.298.000 | 1.915.000 | |
| 45 | 101253 13449 | MAZDA | MX-5 2.0 L A/T | 2013 | 465.000.000 | 1.0 | 465.000.000 | 58.125.000 | 34.875.000 | 6.975.000 | 2.790.000 | 2.325.000 | |
| 46 | 101253 07249 | MAZDA | FX 8 MT | 2013 | 485.000.000 | 1.0 | 485.000.000 | 60.625.000 | 36.375.000 | 7.275.000 | 2.910.000 | 2.425.000 | |
| 47 | 101253 07349 | MAZDA | RX-8 A/T | 2013 | 535.000.000 | 1.0 | 535.000.000 | 66.875.000 | 40.125.000 | 8.025.000 | 3.210.000 | 2.675.000 | |
| 48 | 101255 49532 | MERCEDES BENZ | C180 CGI COUPE AT (C204) (CBU) | 2013 | 648.000.000 | 1.0 | 648.000.000 | 81.000.000 | 48.600.000 | 9.720.000 | 3.888.000 | 3.240.000 | |
| 49 | 101255 49632 | MERCEDES BENZ | C180 CGI COUPE MT (CBU) | 2013 | 432.000.000 | 1.0 | 432.000.000 | 54.000.000 | 32.400.000 | 6.480.000 | 2.692.000 | 2.160.000 | |
| 50 | 101255 43632 | MERCEDES BENZ | C 200 CGI AT (CKD) | 2013 | 509.000.000 | 1.0 | 509.000.000 | 63.625.000 | 38.175.000 | 7.635.000 | 3.054.000 | 2.545.000 | |
| 51 | 101255 43732 | MERCEDES BENZ | C 250 CGI AT (CKD) | 2013 | 633.000.000 | 1.0 | 633.000.000 | 79.125.000 | 47.475.000 | 9.495.000 | 3.798.000 | 3.165.000 | |
| 52 | 101255 47832 | MERCEDES BENZ | C 250 CGI COUPE AT (CBU) | 2013 | 756.000.000 | 1.0 | 756.000.000 | 94.500.000 | 56.700.000 | 11.340.000 | 4.636.000 | 3.780.000 | |
| 53 | 101255 49732 | MERCEDES BENZ | C 250 ESTATE AT (S204) (CBU) | 2013 | 792.000.000 | 1.0 | 792.000.000 | 99.000.000 | 59.400.000 | 11.880.000 | 4.752.000 | 3.960.000 | |
| 54 | 101255 43932 | MERCEDES BENZ | C 300 AT (CKD) | 2013 | 669.000.000 | 1.0 | 669.000.000 | 83.625.000 | 50.175.000 | 10.035.000 | 4.014.000 | 3.345.000 | |
| 55 | 101255 49832 | MERCEDES BENZ | C 350 COUPE AT (C204) (CBU) | 2013 | 1.300.000.000 | 1.0 | 1.300.000.000 | 162.500.000 | 97.500.000 | 19.500.000 | 7.800.000 | 6.500.000 | |

UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM / PRIBADI (PERORANGAN) DIKENAKAN TARIF PROGRESIF

| NO | KODING | MEREK | TYPE | TH BUAT | NJKB - DPBBN-KB | BOBOT | DP PKB | BESARAN BBNKB PENYERAHAN PERTAMA | | | | BESARAN PKB KEPEMILIKAN PERTAMA | | | |
|----|--------------|---------------|--|---------|-----------------|-------|---------------|--|---------------------|------------|------------|---------------------------------|------|--|--|
| | | | | | | | | PRIBADI, TNI/POLRI, Pemerintahan Daerah, Ambulance, DAMKAR | LSK, Angkutan ORANG | UMUM | PRIBADI | Angkutan ORANG | UMUM | LSK, TNI/POLRI, Pemerintahan Daerah, Ambulance, DAMKAR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 56 | 101255 49332 | MERCEDES BENZ | C 63 AMG COUPE (C204) AT (CBU) | 2013 | 1.800.000.000 | 1.0 | 1.800.000.000 | 225.000.000 | 135.000.000 | 27.000.000 | 10.800.000 | 9.000.000 | | | |
| 57 | 101255 49432 | MERCEDES BENZ | C 63 AMG AT (W204) (CBU) | 2013 | 1.600.000.000 | 1.0 | 1.600.000.000 | 200.000.000 | 120.000.000 | 24.000.000 | 9.600.000 | 8.000.000 | | | |
| 58 | 101255 49932 | MERCEDES BENZ | CL 500 AT (CBU) | 2013 | 2.800.000.000 | 1.0 | 2.800.000.000 | 350.000.000 | 210.000.000 | 42.000.000 | 16.800.000 | 14.000.000 | | | |
| 59 | 101255 50132 | MERCEDES BENZ | CLS 350 (C218) AT (CBU) | 2013 | 1.400.000.000 | 1.0 | 1.400.000.000 | 175.000.000 | 105.000.000 | 21.000.000 | 8.400.000 | 7.000.000 | | | |
| 60 | 101255 50232 | MERCEDES BENZ | CLS 350 SHOOTING BRAKE AT (X218) (CBU) | 2013 | 1.400.000.000 | 1.0 | 1.400.000.000 | 175.000.000 | 105.000.000 | 21.000.000 | 8.400.000 | 7.000.000 | | | |
| 61 | 101255 50032 | MERCEDES BENZ | CLS 63 AMG AT (CBU) | 2013 | 2.000.000.000 | 1.0 | 2.000.000.000 | 250.000.000 | 150.000.000 | 30.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | | | |
| 62 | 101255 44232 | MERCEDES BENZ | E 200 CGI AT (CKD) | 2013 | 755.000.000 | 1.0 | 755.000.000 | 94.375.000 | 56.625.000 | 11.325.000 | 4.530.000 | 3.775.000 | | | |
| 63 | 101255 50532 | MERCEDES BENZ | E 200 CGI COUPE AT (CBU) | 2013 | 945.000.000 | 1.0 | 945.000.000 | 118.125.000 | 70.875.000 | 14.175.000 | 5.670.000 | 4.725.000 | | | |
| 64 | 101255 44432 | MERCEDES BENZ | E 250 CGI AT (CKD) | 2013 | 813.000.000 | 1.0 | 813.000.000 | 101.625.000 | 60.975.000 | 12.195.000 | 4.878.000 | 4.065.000 | | | |
| 65 | 101255 50632 | MERCEDES BENZ | E 250 CGI AT (CBU) | 2013 | 963.000.000 | 1.0 | 963.000.000 | 120.375.000 | 72.225.000 | 14.445.000 | 5.778.000 | 4.815.000 | | | |
| 66 | 101255 50732 | MERCEDES BENZ | E 250 CGI ESTATE AT (CBU) | 2013 | 964.000.000 | 1.0 | 964.000.000 | 120.500.000 | 72.300.000 | 14.460.000 | 5.784.000 | 4.820.000 | | | |
| 67 | 101255 50832 | MERCEDES BENZ | E 250 CGI CABRIOLET AT (CBU) | 2013 | 1.040.000.000 | 1.0 | 1.040.000.000 | 130.000.000 | 78.000.000 | 15.800.000 | 6.240.000 | 5.200.000 | | | |
| 68 | 101255 44732 | MERCEDES BENZ | E 250 COUPE AT (CBU) | 2013 | 1.062.000.000 | 1.0 | 1.062.000.000 | 132.750.000 | 79.650.000 | 15.930.000 | 6.372.000 | 5.310.000 | | | |
| 69 | 101255 44932 | MERCEDES BENZ | E 300 AT (CKD) | 2013 | 983.000.000 | 1.0 | 983.000.000 | 122.875.000 | 73.725.000 | 14.745.000 | 5.898.000 | 4.915.000 | | | |
| 70 | 101255 45032 | MERCEDES BENZ | E 350 AT (CBU) | 2013 | 1.276.000.000 | 1.0 | 1.276.000.000 | 159.500.000 | 95.700.000 | 19.140.000 | 7.656.000 | 6.380.000 | | | |
| 71 | 101255 51032 | MERCEDES BENZ | E 350 CABRIOLET AT (CBU) | 2013 | 1.370.000.000 | 1.0 | 1.370.000.000 | 171.250.000 | 102.750.000 | 20.550.000 | 8.220.000 | 6.850.000 | | | |
| 72 | 101255 50932 | MERCEDES BENZ | E 350 CGI COUPE (C207) AT (CBU) | 2013 | 1.380.000.000 | 1.0 | 1.380.000.000 | 172.500.000 | 103.500.000 | 20.700.000 | 8.280.000 | 6.900.000 | | | |
| 73 | 101255 51232 | MERCEDES BENZ | E 500 AT (W212) (CBU) | 2013 | 1.620.000.000 | 1.0 | 1.620.000.000 | 202.500.000 | 121.500.000 | 24.300.000 | 9.720.000 | 8.100.000 | | | |
| 74 | 101255 51132 | MERCEDES BENZ | E 500 COUPE AT (207) (CBU) | 2013 | 1.621.000.000 | 1.0 | 1.621.000.000 | 202.625.000 | 121.675.000 | 24.315.000 | 9.726.000 | 8.105.000 | | | |
| 75 | 101255 50332 | MERCEDES BENZ | E 63 AMG AT (W212) (CBU) | 2013 | 1.862.000.000 | 1.0 | 1.862.000.000 | 232.750.000 | 139.650.000 | 27.930.000 | 11.172.000 | 9.310.000 | | | |
| 76 | 101255 50432 | MERCEDES BENZ | E 63 AMG ESTATE AT (S212) (CBU) | 2013 | 2.079.000.000 | 1.0 | 2.079.000.000 | 259.875.000 | 155.925.000 | 31.185.000 | 12.474.000 | 10.395.000 | | | |
| 77 | 101255 45232 | MERCEDES BENZ | S 300 L AT (CKD) | 2013 | 1.514.000.000 | 1.0 | 1.514.000.000 | 189.250.000 | 113.850.000 | 22.710.000 | 9.084.000 | 7.570.000 | | | |
| 78 | 101255 45332 | MERCEDES BENZ | S 350 L AT (CKD) | 2013 | 1.909.000.000 | 1.0 | 1.909.000.000 | 236.625.000 | 143.175.000 | 28.635.000 | 11.454.000 | 9.545.000 | | | |
| 79 | 101255 48532 | MERCEDES BENZ | S 350 L CGI AT (CBU) | 2013 | 2.059.000.000 | 1.0 | 2.059.000.000 | 257.375.000 | 154.425.000 | 30.885.000 | 12.354.000 | 10.295.000 | | | |
| 80 | 101255 48732 | MERCEDES BENZ | S 500 L CGI AT (CBU) | 2013 | 2.766.000.000 | 1.0 | 2.766.000.000 | 346.000.000 | 207.600.000 | 41.520.000 | 16.608.000 | 13.840.000 | | | |
| 81 | 101255 48832 | MERCEDES BENZ | S 500 L CGI AT (CKD) | 2013 | 2.551.000.000 | 1.0 | 2.551.000.000 | 318.875.000 | 191.325.000 | 38.265.000 | 15.306.000 | 12.755.000 | | | |
| 82 | 101255 34832 | MERCEDES BENZ | S 600 L AT (CBU) | 2013 | 3.212.000.000 | 1.0 | 3.212.000.000 | 401.500.000 | 240.900.000 | 48.180.000 | 19.272.000 | 16.060.000 | | | |
| 83 | 101255 51832 | MERCEDES BENZ | S 63 L AMG AT (CBU) | 2013 | 3.241.000.000 | 1.0 | 3.241.000.000 | 405.125.000 | 243.075.000 | 48.815.000 | 19.446.000 | 16.205.000 | | | |
| 84 | 101255 45632 | MERCEDES BENZ | S 65 AMG AT (CBU) | 2013 | 3.401.000.000 | 1.0 | 3.401.000.000 | 425.125.000 | 255.075.000 | 51.015.000 | 20.406.000 | 17.005.000 | | | |
| 85 | 101255 51932 | MERCEDES BENZ | SL 350 AT (R231) (CBU) | 2013 | 1.782.000.000 | 1.0 | 1.782.000.000 | 222.750.000 | 133.650.000 | 26.730.000 | 10.692.000 | 8.910.000 | | | |
| 86 | 101255 52132 | MERCEDES BENZ | SLK 200 CGI AT (CBU) | 2013 | 897.000.000 | 1.0 | 897.000.000 | 112.125.000 | 67.275.000 | 13.455.000 | 5.382.000 | 4.385.000 | | | |
| 87 | 101255 52232 | MERCEDES BENZ | SLK 250 CGI AT (R172) (CBU) | 2013 | 971.000.000 | 1.0 | 971.000.000 | 121.375.000 | 72.825.000 | 14.565.000 | 5.826.000 | 4.855.000 | | | |

UNTIK KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM / PRIBADI (PERORGANAN) DIKENAKAN TARIF PROGRESIF

| NO | KODING | MEREK | TYPE | TH BUAT | NKKB - DPBBN-KB | BOBOT | DP PKB | BESARAN BNKKB PENYERAHAN PERTAMA | | | BESARAN PKB KEPEMILIKAN PERTAMA | | |
|-----|--------------|---------------|----------------------------------|---------|-----------------|-------|---------------|--|---------------------|------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | PRIBADI, LSK, TNI/POLRI Daerah, Ambulance, DAMIKAR | Angkutan ORANG UMUM | PRIBADI | Angkutan ORANG UMUM | LSK, TNI/POLRI Daerah, Ambulance, DAMIKAR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 88 | 101255 48932 | MERCEDES BENZ | SLK 350 CGI AT | 2013 | 1.511.000.000 | 1.0 | 1.511.000.000 | 188.875.000 | 113.325.000 | 22.665.000 | 9.066.000 | 7.555.000 | |
| 89 | 101255 52032 | MERCEDES BENZ | SLK 55 AMG AT (R172) (CBU) | 2013 | 1.079.000.000 | 1.0 | 1.079.000.000 | 134.875.000 | 80.925.000 | 16.185.000 | 6.474.000 | 5.395.000 | |
| 90 | 101255 46732 | MERCEDES BENZ | SLS AMG AT (CBU) | 2013 | 3.961.000.000 | 1.0 | 3.961.000.000 | 495.125.000 | 297.075.000 | 59.415.000 | 23.768.000 | 19.805.000 | |
| 91 | 101255 52332 | MERCEDES BENZ | SLS AMG ROADSTER AT (R197) (CBU) | 2013 | 3.961.000.000 | 1.0 | 3.961.000.000 | 495.125.000 | 297.075.000 | 59.415.000 | 23.768.000 | 19.805.000 | |
| 92 | 101261 78849 | MI SUBISHI | GS41 GT 2.0L (4X2) A/T | 2013 | 328.000.000 | 1.0 | 328.000.000 | 41.000.000 | 24.600.000 | 4.920.000 | 1.968.000 | 1.640.000 | |
| 93 | 101261 79049 | MI SUBISHI | LANCER 1.8L SEI (4X2) A/T | 2013 | 218.000.000 | 1.0 | 218.000.000 | 27.250.000 | 16.350.000 | 3.270.000 | 1.308.000 | 1.090.000 | |
| 94 | 101261 79549 | MI SUBISHI | LANCER EVO X 2.0L (4X4) A/T | 2013 | 999.000.000 | 1.0 | 999.000.000 | 124.875.000 | 74.925.000 | 14.985.000 | 5.994.000 | 4.995.000 | |
| 95 | 101284 70249 | NISSAN | ALMERA 1.5 (4X2) A/T | 2013 | 173.000.000 | 1.0 | 173.000.000 | 21.625.000 | 12.975.000 | 2.595.000 | 1.038.000 | 865.000 | |
| 96 | 101284 70349 | NISSAN | ALMERA 1.5 (4X2) M/T | 2013 | 165.000.000 | 1.0 | 165.000.000 | 20.625.000 | 12.375.000 | 2.475.000 | 990.000 | 825.000 | |
| 97 | 101284 70449 | NISSAN | ALMERA 1.5 (4X2) M/T (TAXI) | 2013 | 153.000.000 | 1.0 | 153.000.000 | 19.125.000 | 11.475.000 | 2.295.000 | 918.000 | 765.000 | |
| 98 | 101284 70749 | NISSAN | GT-R 3.8 (4X4) A/T | 2013 | 1.648.000.000 | 1.0 | 1.648.000.000 | 206.000.000 | 123.600.000 | 24.720.000 | 9.888.000 | 8.240.000 | |
| 99 | 101284 68149 | NISSAN | TEANA 2.5 CVT (4X2) A/T | 2013 | 390.000.000 | 1.0 | 390.000.000 | 48.750.000 | 29.250.000 | 5.850.000 | 2.340.000 | 1.950.000 | |
| 100 | 101305 05532 | PORSCHE | 911 TURBO S 3.8L A/T | 2013 | 4.080.000.000 | 1.0 | 4.080.000.000 | 510.000.000 | 306.000.000 | 61.200.000 | 24.480.000 | 20.400.000 | |
| 101 | 101356 03449 | SUBARU | BRZ 2.0 RWD 6AT | 2013 | 493.000.000 | 1.0 | 493.000.000 | 61.625.000 | 36.975.000 | 7.395.000 | 2.958.000 | 2.465.000 | |
| 102 | 101356 03549 | SUBARU | IMPREZA 4D 2.0iS AWD CVT | 2013 | 313.000.000 | 1.0 | 313.000.000 | 39.125.000 | 23.475.000 | 4.895.000 | 1.878.000 | 1.565.000 | |
| 103 | 101356 03649 | SUBARU | IMPREZA 4D 2.5 STI AWD SAT | 2013 | 546.000.000 | 1.0 | 546.000.000 | 68.250.000 | 40.950.000 | 8.190.000 | 3.278.000 | 2.730.000 | |
| 104 | 101356 03749 | SUBARU | IMPREZA 4D 2.5 STI AWD 6MT | 2013 | 526.000.000 | 1.0 | 526.000.000 | 65.750.000 | 39.450.000 | 7.890.000 | 3.156.000 | 2.630.000 | |
| 105 | 101356 03849 | SUBARU | IMPREZA 5D 2.0 STI AWD 6MT | 2013 | 550.000.000 | 1.0 | 550.000.000 | 68.750.000 | 41.250.000 | 8.250.000 | 3.300.000 | 2.750.000 | |
| 106 | 101356 03949 | SUBARU | IMPREZA 5D 2.0iS AWD CVT | 2013 | 313.000.000 | 1.0 | 313.000.000 | 39.125.000 | 23.475.000 | 4.895.000 | 1.878.000 | 1.565.000 | |
| 107 | 101356 04049 | SUBARU | IMPREZA 5D 2.5 STI AWD SAT | 2013 | 534.000.000 | 1.0 | 534.000.000 | 66.750.000 | 40.050.000 | 8.010.000 | 3.204.000 | 2.670.000 | |
| 108 | 101356 04149 | SUBARU | IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 6MT | 2013 | 514.000.000 | 1.0 | 514.000.000 | 64.250.000 | 38.550.000 | 7.710.000 | 3.084.000 | 2.570.000 | |
| 109 | 101356 04249 | SUBARU | LEGACY 2.0i AWD CVT | 2013 | 353.000.000 | 1.0 | 353.000.000 | 44.125.000 | 26.475.000 | 5.295.000 | 2.118.000 | 1.765.000 | |
| 110 | 101698 72049 | TOYOTA | 86 2.0L A/T | 2013 | 487.000.000 | 1.0 | 487.000.000 | 60.875.000 | 36.525.000 | 7.305.000 | 2.922.000 | 2.435.000 | |
| 111 | 101698 72149 | TOYOTA | 86 2.0L M/T | 2013 | 480.000.000 | 1.0 | 480.000.000 | 60.000.000 | 36.000.000 | 7.200.000 | 2.880.000 | 2.400.000 | |
| 112 | 101698 72249 | TOYOTA | CAMRY 2.5G A/T | 2013 | 379.000.000 | 1.0 | 379.000.000 | 47.375.000 | 28.425.000 | 5.685.000 | 2.274.000 | 1.895.000 | |
| 113 | 101698 72349 | TOYOTA | CAMRY 2.5L Hybrid A/T | 2013 | 499.000.000 | 1.0 | 499.000.000 | 62.375.000 | 37.425.000 | 7.485.000 | 2.994.000 | 2.495.000 | |
| 114 | 101698 72449 | TOYOTA | CAMRY 2.5V A/T | 2013 | 401.000.000 | 1.0 | 401.000.000 | 50.125.000 | 30.075.000 | 6.015.000 | 2.406.000 | 2.005.000 | |
| 115 | 101381 69149 | TOYOTA | COROLLA ALTIS 1.8 A/T | 2013 | 284.000.000 | 1.0 | 284.000.000 | 35.500.000 | 21.300.000 | 4.260.000 | 1.704.000 | 1.420.000 | |
| 116 | 101381 69249 | TOYOTA | COROLLA ALTIS 1.8 M/T | 2013 | 267.000.000 | 1.0 | 267.000.000 | 33.375.000 | 20.025.000 | 4.005.000 | 1.602.000 | 1.335.000 | |
| 117 | 101381 69349 | TOYOTA | COROLLA ALTIS 2.0 A/T | 2013 | 307.000.000 | 1.0 | 307.000.000 | 38.375.000 | 23.025.000 | 4.605.000 | 1.842.000 | 1.535.000 | |
| 118 | 101381 67449 | TOYOTA | CROWN ROYAL SALOON 3.0G A/T | 2013 | 1.058.000.000 | 1.0 | 1.058.000.000 | 132.250.000 | 79.350.000 | 15.870.000 | 6.348.000 | 5.290.000 | |
| 119 | 101698 74449 | TOYOTA | LMC 1.5 STD (NCP150R-BEMDKD) | 2013 | 132.000.000 | 1.0 | 132.000.000 | 16.500.000 | 9.900.000 | 1.980.000 | 792.000 | 660.000 | |

UPTUK KENDARAAN BERMOTOR BUKAN UMUM / PRIBADI (PERORANGAN) DIKENAKAN TARIF PROGRESIF

| NO | KODING | MEREK | TYPE | TH BUAT | NKB - DPBBN-KB | BOBOT | DP PKB | BESARAN BBNKB PENYERAHAN PERTAMA | | BESARAN PKB KEPEMILIKAN PERTAMA | | |
|-----|--------------|--------|--------------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|---|----------------|---------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | PRIBADI, LSK, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Ambulance, DAMKAR | Angkutan ORANG | PRIBADI | Angkutan ORANG | LSK, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Ambulance, DAMKAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 120 | 101381 65549 | TOYOTA | LIMO 1.5 STD (NCP93R-BEMDKD) | 2013 | 131.000.000 | 1.0 | 131.000.000 | 16.375.000 | 9.825.000 | 1.965.000 | 786.000 | 655.000 |
| 121 | 101698 72749 | TOYOTA | MARK X 2.5 A/T | 2013 | 467.000.000 | 1.0 | 467.000.000 | 68.375.000 | 35.025.000 | 7.005.000 | 2.802.000 | 2.335.000 |
| 122 | 103698 74549 | TOYOTA | VIOS 1.5 E A/T (NCP150R-BEPRKD) | 2013 | 172.000.000 | 1.0 | 172.000.000 | 21.500.000 | 12.900.000 | 2.580.000 | 1.032.000 | 860.000 |
| 123 | 103698 74649 | TOYOTA | VIOS 1.5 E M/T (NCP150R-BEMRKD) | 2013 | 167.000.000 | 1.0 | 167.000.000 | 20.875.000 | 12.525.000 | 2.505.000 | 1.002.000 | 835.000 |
| 124 | 101381 63849 | TOYOTA | VIOS 1.5 E MT (NCP93R-BEMRKD) | 2013 | 170.000.000 | 1.0 | 170.000.000 | 21.250.000 | 12.750.000 | 2.550.000 | 1.020.000 | 850.000 |
| 125 | 103698 74749 | TOYOTA | VIOS 1.5 G A/T (NCP150R-BEPGKD) | 2013 | 191.000.000 | 1.0 | 191.000.000 | 23.875.000 | 14.325.000 | 2.865.000 | 1.148.000 | 955.000 |
| 126 | 103698 74849 | TOYOTA | VIOS 1.5 G M/T (NCP150R-BEMGKD) | 2013 | 181.000.000 | 1.0 | 181.000.000 | 22.625.000 | 13.575.000 | 2.715.000 | 1.086.000 | 905.000 |
| 127 | 101381 63949 | TOYOTA | VIOS 1.5 G AUTOMATIC (NCP93R-BEPGKD) | 2013 | 190.000.000 | 1.0 | 190.000.000 | 23.750.000 | 14.250.000 | 2.850.000 | 1.140.000 | 950.000 |
| 128 | 101381 64049 | TOYOTA | VIOS 1.5 G MT (NCP93R-BEMGKD) | 2013 | 180.000.000 | 1.0 | 180.000.000 | 22.500.000 | 13.500.000 | 2.700.000 | 1.090.000 | 900.000 |

| PLANGKON DINASI | | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------|-------|
| NO | UNIT | SAJIAN | KEBUN | PARAT |
| 1 | KSS III | | | 1 |
| 2 | badis Rumba | | | 2 |
| 3 | karit | Vulturn | | 3 |
| 4 | | | | 4 |
| 5 | | | | 5 |

GUVERNUR S. LAWESI TENGGARA,

NUR ALAM